

PEMANTAUAN PERKARA KORUPSI YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN UMUM SELAMA 2009

BURUK RUPA WAJAH PENGADILAN

- 224 terdakwa korupsi dibebaskan dan 16 koruptor di hukum percobaan pada tahun 2009-

A. PENGANTAR

Sulit mempercayai keseriusan dan komitmen institusi pengadilan untuk memberantas korupsi dinegeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, institusi pengadilan dalam hal ini Pengadilan Umum selama tahun 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi yang saat ini didorong oleh pemerintah.

Meskipun Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A. Tumpa (15/1), menyatakan akan berkomitmen dengan pemberantasan korupsi. Namun faktanya pengadilan umum selama setahun dibawah kepemimpinan Harifin Tumpa **gagal** memberikan perubahan signifikan bagi dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Dalam penanganan perkara korupsi di pengadilan umum, hasil yang ditunjukkan selama tahun 2009 masih mengecewakan dan. Baik MA maupun Pengadilan Umum dibawahnya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), kenyataannya masih menjadi lembaga idaman bagi para pelaku korupsi (pengadilan idola koruptor). Hal ini bisa dilihat dari perkara korupsi yang diperiksa dan diputus pengadilan umum sepanjang tahun 2009.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch selama tahun 2009 terdapat **199 perkara korupsi dengan 378 orang terdakwa** yang diperiksa dan diputus (divonis) oleh pengadilan diseluruh Indonesia mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri =160 perkara), banding (Pengadilan Tinggi= 18 perkara), kasasi/peninjauan kembali (MA=21 perkara).¹ Sedangkan nilai kerugian negara dari perkara yang diperiksa dan diputus pengadilan diperkirakan mencapai **Rp 1,772 triliun**.

Rekap Perkara Korupsi yang diputus di Pengadilan Umum Tahun 2009.

	Jumlah Terdakwa	Vonis Bebas/ lepas	Vonis -1 tahun	Vonis 1,1-2 tahun	Vonis 2,1-5 tahun	Vonis 5,1-10 tahun	Vonis Diatas 10	Vonis Percobaan
Terdakwa	378	224	82	23	26	6	1	16
%	100	59,26	21,69	6,08	6,88	1,59	0,26	4,23

Dari 378 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus, sebanyak 224 **terdakwa (59,26 %) divonis bebas/lepas** oleh pengadilan. Hanya 154 terdakwa (40,74 %) yang akhirnya divonis bersalah. Namun dari yang akhirnya diputuskan bersalah tersebut, dapat dikatakan belum memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Terdakwa yang divonis dibawah 1 tahun penjara adalah sebanyak **82 terdakwa (21,69 %)**. Diatas 1,1 tahun hingga 2 tahun sebanyak 23 terdakwa (6,08 %), divonis 2,1 tahun hingga 5 tahun sebanyak 26 terdakwa (6,88 %) dan divonis 5,1 tahun hingga 10 tahun yaitu

¹ Hasil pantauan ICW berasal dari media nasional dan daerah serta laporan mitra kerja ICW di beberapa daerah.

sebanyak 6 terdakwa (1,59). Hingga tahun 2009 berakhir hanya ada 1 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun (0,26 %). Hal yang memprihatinkan terdapat 16 terdakwa perkara korupsi yang divonis percobaan (4,23%).

Dalam hal vonis bersalah, yang paling ringan adalah **3 (tiga) bulan** penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Suprayitno, SE, direktur CV Bhakti Nusa yang diduga melakukan korupsi dana pengadaan laptop. Sedangkan vonis yang paling berat dijatuhkan kepada Nursetyadi Pamungkas (Direktur Utama PT Sentra Artha Utama) yang divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Situbondo karena perkara korupsi Kas daerah Kabupaten Situbondo senilai Rp 45,73 miliar.

Berdasarkan aktor atau pelaku, selama tahun 2009 para mantan atau anggota DPR/D yang paling banyak menjadi terdakwa perkara korupsi yaitu sebanyak 116 orang. Selanjutnya masuk dalam kelompok tiga besar lainnya adalah pelaku korupsi dari sektor swasta yaitu 69 orang terdakwa, Kepala/Staf Dinas sebanyak 63 orang terdakwa, dan staf/mantan pegawai pemerintah daerah/kabupaten sebanyak 52 orang terdakwa.

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dari sejumlah perkara korupsi yang diadili oleh Pengadilan Umum selama tahun 2009. *Pertama*, jumlah vonis bebas/lepas bagi terdakwa masih dominan dan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya (lihat tabel). Jumlah terdakwa yang divonis bebas/lepas pada tahun 2009 – berdasarkan pantauan ICW - yaitu 224 terdakwa kenyataannya menambah jumlah terdakwa dibebaskan atau dilepaskan oleh Pengadilan Umum. Dengan demikian sejak 2005 hingga 2009 sedikitnya ada **883 terdakwa korupsi yang divonis bebas/lepas oleh Pengadilan Umum**.

Rekap terdakwa korupsi bebas dan bersalah di Pengadilan Umum selama 2005- 2009 (berdasarkan pemantauan ICW)

Tahun	Perkara	Terdakwa	Bebas/lepas	%	Bersalah	%
2005	71	243	54	22,22 %	189	77,77 %
2006	124	361	116	31,4 %	245	68,6 %
2007	166	373	212	56,84 %	161	43,16 %
2008	194	444	277	62,38 %	167	37,61 %
2009	199	378	224	59,26 %	154	40,74 %
Total	754	1799	883	49,08	916	50,91

Dari semua pengadilan, Pengadilan Negeri Makassar yang saat ini paling banyak membebaskan terdakwa korupsi (38 terdakwa), disusul oleh Pengadilan Negeri Tahuna Talaud (20 terdakwa), Mahkamah Agung (18 terdakwa), Pengadilan Negeri Manado (10 terdakwa) dan Pengadilan Negeri Gresik (9 terdakwa).

Daftar 5 besar Pengadilan yang bebaskan terdakwa korupsi

No	Pengadilan	Terdakwa (bebas/lepas)
1.	Pengadilan Negeri Makassar	38
2.	Pengadilan Negeri Tahuna Talaud	20
3.	Mahkamah Agung	18
4.	Pengadilan Negeri Manado	10
5.	Pengadilan Negeri Gresik	9

Kedua, terjadi *trend* terdakwa yang divonis ringan sesuai batas minimal penjatuhan pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Korupsi bahkan dibawah 1 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 3 dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 disebutkan bagi pelaku korupsi yang terbukti bersalah maka dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara. Sepanjang tahun 2009, tercatat dari 154 terdakwa yang divonis bersalah, paling dominan (sebanyak 81 terdakwa atau lebih separuhnya) divonis hanya 1 tahun penjara bahkan kurang dari setahun. Dalam hal ini terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana pada batas minimal yang ditentukan. Bahkan terdapat dua terdakwa kasus korupsi yang hanya di vonis 3 bulan penjara seperti terjadi Pengadilan Negeri Sumbawa dan Bengkulu. Jika ini dibiarkan oleh Ketua MA, bukan mustahil dimasa mendatang para hakim banyak menjatuhkan vonis dibawah satu tahun atau hanya beberapa bulan penjara saja.

Ketiga, fenomena hukuman percobaan dalam perkara korupsi makin marak terjadi. Hingga akhir 2009 ditemukan adanya 16 koruptor yang divonis dengan hukuman percobaan. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2008 lalu yang hanya berjumlah 10 koruptor. Dengan kondisi ini maka dapat dipastikan terdakwa tidak perlu menjalani hukuman meskipun dinyatakan bersalah. Terkesan ada upaya “pensiasatan” hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan dalam penjatuhan vonis. UU Tipikor hanya mengatur mengenai batas minimum hukuman yaitu 1 tahun penjara namun tidak mengatur apakah seseorang koruptor dapat dihukum dengan hukuman percobaan. Meskipun dinilai kontroversial, faktanya MA saat ini bahkan tengah mempertimbangkan pemberian vonis hukuman percobaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Pertimbangannya, menurut Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong (24 Mei 2009), dalam memutuskan hukuman percobaan terhadap terdakwa perkara korupsi, hakim lebih memperhatikan asas keadilan hukum.

Fenomena putusan pengadilan umum - yang tidak pro pemberantasan korupsi dan tidak adil bagi orang miskin dan tidak berdaya - pada tahun 2009 menunjukkan bahwa institsusi pengadilan sulit diharapkan menjadi benteng keadilan. Justru yang mencuat dimata masyarakat pengadilan telah menjadi benteng ketidakadilan dan “surga “ bagi koruptor. Kondisi ini makin diperparah dengan studi banding yang dilakukan sedikitnya 91 pejabat pengadilan ke luar negeri pada akhir tahun 2009. Publik mencurigai studi banding ini lebih tepat sebagai jalan-jalan ke luar negeri karena kita tidak pernah tahu apa hasil studi banding dan manfaat yang dapat diperoleh untuk memperbaiki citra pengadilan yang tetap “buruk rupa” hingga saat ini.

B. STATISTIK PERKARA DAN TERDAKWA

1 Perkara dan Terdakwa (terpantau)

Jumlah perkara	:	199
Jumlah terdakwa	:	378
Perkiraan Nilai Kerugian Negara	:	Rp 1,772triliun

2. Tingkat Pengadilan (terpantau)

Pengadilan Negeri	:	160
Pengadilan Tinggi	:	18
Mahkamah Agung	:	21

3. Hukuman

	Jumlah Terdakwa	Vonis Bebas	Vonis -1 tahun	Vonis 1,1 -2 tahun	Vonis 2,1-5 tahun	Vonis 5,1-10 tahun	Vonis Diatas 10	Vonis Percobaan
Terdakwa	378	224	82	23	26	6	1	16
%	100	59,26	21,69	6,08	6,88	1,59	0,26	4,23

Ket: Vonis Bebas : 224 terdakwa (112 perkara)

4. Aktor

Aktor	Jumlah Terdakwa
Anggota DPR/D	116
Swasta	69
Staf BUMN/BUMD/Bank	23
Kepala/Staf Dinas/Departemen	63
Staf/kepala RS	6
Anggota KPU	5
Ex wakil/Gubernur/Bupati	16
Kepala Sekolah/ Pejabat Kampus	7
Kepala/Staf Pertanahan/pengadilan	4
Staf /Kepala Pemkab/Pemda	52
Ex/Lurah/Camat /desa	15
Bappeda/BPK/BRR	2
Jumlah	378

Jakarta, 5 Januari 2010

Data dihimpun dan disusun oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch

C. DAFTAR PERKARA KORUPSI YANG DIPERIKSA DAN DIPUTUS PENGADILAN (UMUM) SELAMA 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
1.	Proyek perluasan waduk Rawa Babon, Kelurahan Kelapa Dua Wetan		HM Iwan , mantan Camat Ciracas	Sarpin Rizaldi, Tamrin Tarigan, Djalili Zairin	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 7 tahun	8 Januari 2009
2.	pengadaan lahan jalan simpang susun (interchange) di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang		Camat Cikande Edi S Hidayat, mantan Camat Cikande Heru Utomo, dan calo tanah Ikhrom Komarudin.		Pengadilan Negeri Serang	Bebas	15 Januari 2009
3.	proyek pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Situbondo - Bondowoso		Nanang Soedarminto, Direktur PT Mardika Sarana Engineering (MSE) dan Rusgianto	Ali Makki SH	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas	21 Januari 2009
4.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau	Rp 1 miliar	Maulana Harahap dan Totok, pegawai BKSDA Riau	Hasnawati	Pengadilan Negeri Pekanbaru	4 tahun penjara	23 Januari 2009
5.	Penyimpangan dana nasabah BRI	Rp. 3,6 miliar	Darmawan Darabba, Mantan Teller Bank BRI Sombaopu	Syarifuddin Umar	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	28 Januari 2009
6.	Kredit BRI Cabang Bima		Ahmad Rimawan dan Kiemas Gunaidi		Pengadilan Negeri Raba Bima	Bebas	10 Januari 2009
7.	Pengadaan CT Scan	Rp 1 miliar	dr Titik Dyah Widyowati, mantan Kabid Pelayanan RSUD Gresik		Pengadilan Negeri Gresik	1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun	23 Januari 2009
8.	penetapan peraturan untuk meningkatkan penghasilan anggota DPRD	Rp 4,2 miliar	Enam terdakwa (James Agust Pattiwael, Gunawan M Suud, Zainal Arifin, Mohammad Sahil Al Hasni, KRMH Satriyo Hadinagoro, dan Bambang Rusiantoro).	-	Pengadilan Negeri Surakarta	Bebas	21 Januari 2009
9.	Pengadaan Buku Ajar	Rp 87 juta	mantan Bupati Purworejo Marsaid		Pengadilan Tinggi Semarang	1 tahun penjara	Januari 2009
10.	Pungutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	Rp 63 juta	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Hanny Tandayu dan bendahara, Regina Tatengkeng	Rustam Hutabarat,	Pengadilan Negeri Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun penjara	Januari 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
11.	Anggaran penunjang kegiatan pimpinan, pemeliharaan kegiatan dinas, kesekretariatan dan bantuan sosial	Rp 2,97 miliar	Mantan Bupati Karanganyar Sri Sadoyo Hardjomigoena. Suparno dan Suparno HS (mantan Pimpinan DPRD Kr.Anyar)	Arlandi Triyogo	Pengadilan Negeri Karanganyar	Bebas	15 Januari 2009
12.	kas bon APBD	Rp 1 miliar	mantan Bupati Bireun Mustafa Glangang.		Pengadilan Negeri Bireun	1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun	23 Februari 2009
13.	kas bon APBD	Rp 1 miliar	Amiruddin Idris (mantan Bupati Bireun) dan Hasan Basri Djalil (Sekdakab Bireuen)		Pengadilan Negeri Bireun	Bebas	23 Februari 2009
14.	Proyek reklamasi Pantai Sangkapura Bawean senilai Rp 1,2 miliar	Rp 366 juta	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (kini Badan Lingkungan Hidup) Gresik, mantan Kepala Tata Usaha Dinas LHPE Gresik Siti Kuntjarini, Direktur CV Kebangkitan Bangsa Idang Buang Guntur dan Direktur CV Daun Jaya sebagai rekanan		Pengadilan Negeri Gresik	Bebas	10 Februari 2009
15.	pengadaan peralatan teknis produksi di TVRI.	Rp 5,2 miliar	Sumita Tobing, mantan Direktur Utama TVRI,	Panusunan Harahap, Reno Listowo	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	12 Februari 2009
16.	dana Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 21,3 miliar	Chairuddin, Kadispenda Bengkulu		Mahkamah Agung	18 bulan penjara	Februari 2009
17.	kredit fiktif BNI	Rp. 27 miliar	H. Tajang dan Basri Adbah (Direktur PT A'Tiga)	Syarifuddin Umar	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	Februari 2009
18.	pengadaan pupuk senilai 12 ribu ton		Damayanto Sutejo (Mantan Direktur Pemasaran PTPN XIV	Syarifuddin Umar	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	Februari 2009
19.	Dana KPUD Banten	Rp 299 juta	Mantan Kabag Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten Nana Mulyana	Masrimal	Pengadilan Negeri Serang	2 tahun	6 Februari 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
20.	pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (MPK) pada dinas Tata Ruang.		Ketua Yayasan Satya Pradana Timur (YSPT) Endi Zulfikar Tumu S.Pt	Jootje sampaleng SH MH serta didampingi Afif Januarsyah SH dan Lulik Jatimukoro SH	Pengadilan Negeri Tolitoli	Bebas	12 Februari 2009
21.	dana Unit Pelayanan Teknis (UPT) bersumber dari APBD tahun anggaran 2004	Rp 1,7 miliar	Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Labuhanbatu, dr H Nazmil Fuad Harahap MKes,	Baslin Sinaga SH MH, Syahrul Rizal SH MH dan Bony Daniel SH	Pengadilan Negeri Rantauprapat	Bebas	18 Februari 2009
22.	dana Unit Pelayanan Teknis (UPT) bersumber dari APBD tahun anggaran 2004	Rp 1,7 miliar	Daniel Hamonangan Manurung SKM, Wakil Kadiskes Labuhanbatu	Syahrul Rizal SH MH, Alex TMH Pasaribu SH dan Bony Daniel SH	Pengadilan Negeri Rantauprapat	1 Tahun penjara	18 Februari 2009
23.	Dana KUT di Gresik		A Nadir, Ketua DPRD Gresik		Pengadilan Negeri Gresik	Bebas	11 Februari 2009
24.	dana anggaran jabatan di pos anggaran DPRD blora tahun 2004		Ketua DPRD Blora, WARSTI	Subahrhan, Hongkun Otoh dan Aminudin.	Pengadilan Negeri Blora	2 tahun penjara	10 Februari 2009
25.	Pengadaan Buku Ajar BP TA 2004 dan 2005	Rp.11M	Kartidjan (mantan Kasubdin TK dan SD)		Pengadilan Negeri Pematang	Bebas	23 Februari 2009
26.	proyek pembangunan 30 unit rumah bantuan BRR NAD-Nias di Desa Rima Keuneureum, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar tahun 2005		Saiful Hayat		Pengadilan Tinggi Aceh	Bebas	19 Maret 2009
27.	APBD Kab. Luwu Tahun 2004 Kab. Luwu	Rp. 1,5 Miliar	28 mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004	Syarifuddin Umar	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	23 Maret 2009
28.	APBD Kab. Luwu Tahun 2004 Kab. Luwu	Rp. 1,5 Miliar	mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang, mantan Sekda Luwu Andi Baso Gani, dan mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Luwu M Sabila	Syarifuddin Umar	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
29.	APBD Kab. Luwu Tahun 2004 Kab. Luwu	Rp. 1,5 Miliar	2 mantan pimpinan DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004	Syarifuddin Umar	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	25 Maret 2009
30.	dana pengadaan proyek LAN/WAN		Slamet Hidayat, dari LPM ITS		Pengadilan Negeri Bondowoso	1 tahun penjara	11 Maret 2009
31.	dana pengadaan proyek LAN/WAN		Idham Ma'arif, konsultan pengawas dari LPM ITS		Pengadilan Negeri Bondowoso	Bebas	11 Maret 2009
32.	Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertambangan	Rp 114 juta	A Rosman, Bendahara Dinas Pertambangan	Amril SH	Pengadilan Negeri Maros	Bebas	31 Maret 2009
33.	Biaya operasional KPUD Kukar	Rp 12,5 miliar	Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kutai Kartanegara (Kukar) Ishak Iskandar dan Sekretarisnya Ardiansyah		Pengadilan Negeri Tenggarong	Lepas	12 Maret 2009
34.	anggaran operasional Tug Boat 2004 di Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik	Rp 133 juta	Dhani Suwanto, Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut, Sungai, dan Danau (Subdin Hubla) Dishub Gresik	Supriyanto	Pengadilan Negeri Gresik	1,5 tahun penjara.	6 Maret 2009
35.	Gratifikasi rekanan proyek pengadaan alat kesehatan dan non kesehatan rumah sakit/rumah sakit umum se-Provinsi NTB tahun 2005		Ahmad Dahlan (direktur PT Andiarta Matra Utama)		Pengadilan Negeri Mataram	1,5 tahun penjara.	20 Maret 2009.
36.	proyek Jalan Lingkar Ketapang (JLK),	Rp 346 juta	Bambang Sugeng Setiono. pimpinan proyek		Mahkamah Agung	2,5 tahun penjara	Maret 2009
37.	dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri	Rp70,9 miliar	Henry Leo, rekanan swasta		Mahkamah Agung	6 tahun penjara	Maret 2009
38.	APBD Sumbawa tahun 2003	Rp 363 juta	Ir.Umar dan Ali Ibnu Husein SE (anggota DPRD Sumbawa)		Pengadilan Negeri Sumbawa	3 bulan penjara <u>Tuntutan JPU</u> 8 tahun penjara	Mei 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
39.	Proyek rehab gedung dari komite sekolah di Ponorogo hibah Belanda		Awan Mega Pertiwi, Dinas Pendidikan Ponorogo	H Parman Soeparman	Mahkamah Agung	4 tahun penjara	Maret 2009
40.	Proyek rehab gedung dari komite sekolah Ponorogo hibah Belanda		Onisimus Rasid HP, Dinas Pendidikan Ponorogo		Mahkamah Agung	1 tahun penjara	Maret 2009
41.	Proyek pengadaan Lahan Untuk Membangun Gedung Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Medan	Rp 1 miliar	Kepala Seksi Umum Bagian Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Medan Endang Firmandyah	Kusnyoto SH	Pengadilan Negeri Medan	4 tahun penjara	18 Maret 2009
42.	Proyek pembangunan 30 unit rumah bantuan BRR, desa Rima Keuneureum, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar		Saiful Hayat, mantan anggota DPRD		Pengadilan Tinggi Jakarta	Bebas	Maret 2009
43.	Pos Anggaran DPRD NTB	Rp1,149 miliar	Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs H. Lalu Serinata,	Putu Suika, SH Arini, SH, Harini, SH, Surya Yulie Hartati, SH dan Tjuttjut Atmadja, SH.	Pengadilan Negeri Mataram	5 tahun penjara	April 2009
44.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tulang Bawang Jaya (Tbj) Tahun 2006	Rp285 juta	Kadarsyah yang juga Kasubbag Proda II Bagian Ekonomi Pemkab Tuba		Pengadilan Negeri Menggala	1 tahun penjara	1 April 2009
45.	Pengadaan Laptop di Pemkot Bengkulu	Rp 105 juta	Suprayitno, SE , direktur CV Bhakti Nusa	Susanto	Pengadilan Negeri Bengkulu	3 bulan	April 2009
46.	dana dana Persatuan Sepakbola Aceh Utara (PSAU)	Rp 1,2 miliar	Asaf bin Ishak, mantan anggota DPRK Aceh Utara	Minanoer Rachman	Pengadilan Negeri Lhoksukon	2 tahun penjara	15 April 2009
47.	pembangunan Aula SMK Negeri I Karimun	Rp48 juta	Raja Afdillah PPTK proyek dan Sofian Efendi, Direktur CV Bangun Utama Sukses		Pengadilan Negeri Tanjungpinang	1 tahun penjara	29 April 2009
48.	pengadaan kapal pancing ikan tuna untuk fakir miskin di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar	Rp 700 juta	Adril selaku Pimbagpro, Rinaldi Nur, Direktur CV AGM dan Amry, mantan Kepala Dinsos provinsi	Dina Krisnayanti	Pengadilan Negeri Padang	1 tahun penjara	14 April 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
49.	pengadaan lahan industri di Tanjung Pengaru Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri	Rp 1,3 Miliar	mantan Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Karimun, Yan Indra, Kepala Desa Pangke, M. Noor Idris, mantan Kasubag Pertanahan Tapem, Suhaimi, dan mantan Camat Meral, Raja Ubaidillah	Zainuddin	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,	1,5 tahun penjara	7 April 2009
50.	pengadaan meubeler untuk SMP/SMA/SMK tahun 2007	Rp 250 juta	Dewa Putu Supartiana, kepala dinas Kabupaten Negara	Widarti, SH	Pengadilan Negeri Negara	Bebas	22 April 2009
51.	pengadaan meubeler untuk SMP/SMA/SMK tahun 2007		Dwi Korawan, Direktur CV. Gita		Pengadilan Negeri Negara	Bebas	22 April 2009
52.	dana APBD Kabupaten Jepara	Rp 6,68 miliar	Masykuri dan Solihin Tas'an, ketua dan wakil ketua dewan Jepara 1999-2004		Mahkamah Agung	Lepas	April 2009
53.	proyek pengadaan bibit karet okulasi tidak bersertifikat uji ulang mutu	Rp 93 juta	M Nasrun selaku Kepala BPDAS Ketahun dan Ir Dadan.		Pengadilan Negeri Bengkulu	Bebas	April 2009
54.	pengelembungan anggaran APBD periode 2003-2004	Rp 3,66 miliar	ketiga pimpinan DPRD Demak periode 1999-2004 KH Nurul Huda MA (Ketua), H. Suharmin (Wakil Ketua) dan H.M. Ghofar (Wakil Ketua).	Supomo SH,	Pengadilan Negeri Demak	Bebas	23 April 2009
55.	rehabilitasi dan pengadaan mobiler di SMA Negeri Bandar Khalifah, Serdang Bedagai		Kadis Pendidikan Nasional (Diknas) Serdang Bedagai (Sergai), Drs Rifai Bakri Tanjung MAP		Pengadilan Negeri Tebingtinggi-Deli	Bebas	20 April 2009
56.	PT Pos Jakarta Cabang Taman Fatahillah	Rp 14 miliar	mantan Kepala Kantor Pos Jakarta Cabang Fatahillah Fahrurrozy, mantan Manajer Pemasaran PT Pos Indonesia, Fatahillah, dan mantan manajer pemasaran PT Pos Fatahillah, Widiyanto.	Gusnawan	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	24 April 2009
57.	Kasda Kabupaten Situbondo	Rp 45,73 miliar	Nursetyadi Pamungkas, Direktur Utama (Dirut) PT Sentra Artha Utama		Pengadilan Negeri Situbondo	12 tahun penjara	18 Mei 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
58.	Perbaikan dan perawatan rumah dinas guru senilai Rp66 juta di 18 cabang dinas (Cabdin) P dan K Kabupaten Bangkalan pada 2005		Hasanuddin Buchori, mantan kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bangkalan periode 1999-2006	Febri SH dan I Wayan SH	Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan	Bebas	20 Mei 2009
59.	gratifikasi) dalam kasus proyek prona atau pembuatan sertifikat tanah yang dibiayai oleh negara.		Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare Andi Asmar Wirawan	Muhammad Zainal Arifin (ketua), Yoga Perdana, dan Triapsari	Pengadilan Negeri Parepare	Bebas	7 Mei 2009
60.	Gratifikasi dari rekanan proyek pengadaan alat kesehatan dan non kesehatan rumah sakit/rumah sakit umum se-Provinsi NTB tahun 2005	Rp3,5 miliar	dr Baiq Magdalena, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB)	Maria Ana Samiati, Agustina Pattipeilohy dan Djamali	Pengadilan Tinggi Mataram	6 tahun penjara	11 Mei 2009
61.	Tukar guling tanah kas desa Sumpat Kamjawiyo senilai Rp 1,8 miliar	Rp 150,2 juta.	Kepala Desa Sumpat, Kecamatan Driyorejo, Gresik, Kamja Wijono		Pengadilan Negeri Gresik	Bebas	12 Mei 2009
62.	Penyaluran Raskin (beras miskin) di Kelurahan Binjai Estate, Binjai Selatan, Kotamadya Binjai		Arman Syahril S. Sos	Ponis Tarigan,SH, Prof.DR Jatinar Nababan,SH dan Yasrin Nazir Nasution,SH	Pengadilan Tinggi Sumut	Bebas	29 Mei 2009
63.	Pengambilalihan lahan aliran sungai milik negara		Johanis Piter dan Alex Wowiling	Jhony Sitohang SH MH, Robert Posumah SH dan Saur Sitindaon SH MH	Pengadilan Negeri Manado	Bebas	18 Mei 2009
64.	Dana Alokasi Khusus Kota Kediri tahun 2007 untuk pengadaan sejumlah barang perlengkapan sekolah.		tiga pegawai PT Tiga Serangkai yaitu, Teguh, Sudarno dan Suharto	Widada SH	Pengadilan Negeri Kota Kediri	Bebas	20 Mei 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
65.	pembebasan lahan interchange (jalan simpang susun) pertengahan 2006 di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kota Serang	Rp. 3,9 miliar.	Sekda Pemkab Serang, R.A Syahbandar, Inspektorat Kota Serang, Martedjo, dan Asda II Pemkot Serang, Dedi Kusumayadi.	Syamsi, SH	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	13 Mei 2009
66.	Proyek bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh (BRSDK) di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banten	Rp 506 juta	Dani Mulya Kusumah, mantan pimpinan proyek	Sabarudin Ilyas, Tito Suhud dan Ucu Jaya Sarjana	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	27 Mei 2009
67.	suap pinjaman daerah	Rp. 1,5 miliar	Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, H.M Acang	Yapi SH, MH, Sunarti, SH, dan Arie Setiyo Ranjtoko, SH	Pengadilan Negeri Pandeglang	Bebas	7 Mei 2009
68.	Dana Penunjang Kegiatan Bagi Pimpinan Dewan periode 1999 - 2004.	Rp 300 juta	Fabianus Binjab, mantan Wakil Ketua (Waket) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke		Pengadilan Negeri Merauke	Bebas	12 Mei 2009
69.	Program Ajudikasi LMPDP (sertifikat tanah massal) tahun 2006,		Bambang Suerman, mantan Kepala Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh		Pengadilan Tinggi Surabaya	4 tahun penjara	5 Mei 2009
70.	Diklat Pembekalan Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 2008.	Rp 400 juta	Mantan Kepala Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) Magelang, Thomas Widodo, Totok S Munanto (Ketua Tim Panitia Pusat) dan Djumirah (Bendahara Tim Panitia Pusat)		Pengadilan Negeri Magelang	1 tahun penjara	28 Mei 2009
71.	Bulog Divre Sulut		Nono (mantan Kadivres Sulut) dan Doly, Dirut PT Mitra Tani Sentosa	Frans Liemena, Winaryo MH serta I Made Sukanada SH MH	Pengadilan Negeri Manado	Lepas	6 Mei 2009
72.	Pengadaan kendaraan dinas pad tahun 2004 .	Rp 365 juta	Mantan sekretaris DPRD Kabupaten Maros, Andi Nurzal Pawedjoi	Parulian Hutahean	Pengadilan Negeri Maros	1 tahun 7 bulan	9 Mei 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
73.	dana kesehatan untuk 40 anggota DPRD Manggarai	Rp 148 juta	Ketua DPRD Manggarai, John Ongge dan Kepala AJB Bumiputra Perwakilan Kupang, Abdul Jafar	Slamet Riyadi M.A. Rofiq dan Agus Maksum	Pengadilan Negeri Ruteng	4 tahun penjara	13 Mei 2009
74.	pinjaman Bank Jabar	Rp 200 miliar	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang Wadudi Nurhasan		Pengadilan Negeri Pandeglang	2 tahun penjara	25 Mei 2009
75.	pengadaan lahan lapangan terbang (Lapter) Blimbing Sari Banyuwangi		Sudjiharto, Mantan Sekretaris Kabupaten Banyuwangi dan Sugeng Siswanto mantan Camat Kabat Banyuwangi		Pengadilan Negeri Banyuwangi	4 tahun penjara	25 Mei 2009
76.	Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (IPAPD)		Mukhamad Arwani, Kades Sitirejo		Mahkamah Agung	Bebas	Juni 2009
77.	Kredit Fiktif di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia		Effendy Sutrisno, mantan bendahara PKPRI, Kamarudin, bekas karyawan usaha dagang (UD) PKPRI, M.Ervandi, karyawan bagian usaha kredit (UK) dan M. Supra, salah seorang staf di lingkungan Pemkab Pamekasan		Pengadilan Negeri Pamekasan	Bebas	9 Juni 2009
78.	pengadaan 24.134 potong batik KPUD Gresik	Rp 2,41 miliar	anggota KPU Gresik Abdul Basith Fauzan, Sekretaris Panitia dan Bagian Perencanaan Sekretariat KPU Gresik Tursilowanto Herujogi dan Pelaksana Pengadaan Batik dari CV Karunia Agung Khoirul Anwar	Jemmy Whempy Lantu	Pengadilan Negeri Gresik	Bebas	11 Juni 2009
79.	penjualan aset PT Garam (Persero)	Rp 25 juta	Munir Syam	Abdul Madjid Rahim	Pengadilan Tinggi Jatim	Bebas	19 Juni 2009
80.	Proyek peningkatan jalan Bideng Desa Bikang Toboali Kabupaten Bangka Selatan		Oki Jaya Hermanto, Adrian Fahmi,	CH Retno Damayanti	Pengadilan Negeri Sungailiat	Bebas	9 Juni 2009
81.	Pengadaan barang/jasa di Dinkes tahun anggaran 2006 Kabupaten Bangka Selatan	Rp 62 juta	dr Budiman, Kadinkes Pangkalpinang	Rosidin	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Bebas	9 Juni 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
82.	Dana perjalanan dinas anggota dewan tahun 2003-2004	Rp104,9 juta	Ramli Aziz SH, mantan Sekretaris DPRD Lhokseumawe	Maratua Rambe SH, Azhari SH dan M Nazir SH	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Bebas	11 Juni 2009
83.	APBD Gate Kota Cirebon	Rp1,3 miliar	10 orang mantan Ketua DPRD Kota Cirebon		PK Mahkamah Agung	Bebas	3 Juni 2009
84.	Manado Beach Hotel atau MBH Gate	Rp11,7 miliar	Roy Wullur, swasta	Johny Butar-Butar, SH. Saur Sitindaon, SH. dan I Made Sukanada, SH	Pengadilan Negeri Manado	Bebas Tuntutan JPU 4 tahun penjara	3 Juni 2009
85.	Manado Beach Hotel atau MBH Gate	Rp11,7 miliar	Anggota DPR, Joseph Patty,	I Made Sukanada	Pengadilan Negeri Manado	Bebas	26 Juni 2009
86.	Manado Beach Hotel atau MBH Gate	Rp11,7 miliar	Amril Budiman	I Made Sukanada	Pengadilan Negeri Manado	Bebas	27 Mei 2009
87.	Proyek pengadaan benih padi dan jagung di Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanakan) Kabupaten Pekalongan,		Sony Yulianto, Ahmad Muzakim, Ir Trisno Raharjo. Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Distanak Kabupaten Pekalongan, Sugiyo Hadi Pranoto.	Yahya Syam	Pengadilan Negeri Pekalongan	1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun penjara	26 Juni 2009
88.	Skandal Bank Bali	Rp 546 miliar	Joko S Tjandra, Direktur PT EGP		PK Mahkamah Agung	2 tahun penjara	Juni 2009
89.	Skandal Bank Bali	Rp 546 miliar	Syahri Sabirin, mantan Gubernur BI		PK Mahkamah Agung	2 tahun penjara	Juni 2009
90.	Proyek Sub PON Kaltim	Rp 380 juta	Mahyudin ST , konsultan perencana	Idrus SH MHum, Benyamin Naramesakh SH dan Sumino SH	Pengadilan Negeri Balikpapan	Bebas	24 Juni 2009
91.	pemotongan dana bantuan desa di Kabupaten Demak	Rp 2,148 miliar	Mantan Bupati Demak, Dra Hj Endang Setyaningdyah MM,	Supomo SH MH, Sumedi SH dan Retnoningsih SH	Pengadilan Negeri Demak	Bebas	25 Juni 2009
92.	pengadaan lahan kantor Pengadilan Agama (PA) Watampone		Darwis, swasta penjual tanah		Pengadilan Tinggi Sulsel	Bebas	18 Juni 2009
93.	pengadaan alat medis pada Dinkes tahun 2006	Rp 214 juta	Hery Wibowo, Direktur Direktur PT Dharma Mulia Multi Farma Semarang Semarang		Pengadilan Negeri Banjarnegara	Bebas	1 Juni 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
94.	Pengadaan Tanah untuk Stadion Madya/Sport Center di Kampung Sanden, Magelang Utara,	Rp 11 Miliar	Herman Santoso (Panitia dalam Pengadaan Tanah)		Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Bebas	14 Juni 2009
95.	program pemberdayaan penyandang masalah sosial	Rp 79 juta	M.Endro Kusumo (Kabag Keuangan) dan Enias Rumbewas (Kasubag perbendaharaan)		Pengadilan Negeri Biak	Bebas	15 Juni 2009
96.	APBD Sumbawa tahun 2003	Rp 363 juta	Ir.Umar dan Ali Ibnu Husein SE (anggota DPRD Sumbawa)		Pengadilan Tinggi Mataram	3 bulan penjara	Juni 2009
97.	Pengadaan Aspal Dana Partisipatif Bappeda 2004,	Rp.100Jt	Mafud, Bappeda		Pengadilan Negeri Pematang	Bebas	24 Juni 2009
98.	program adjudikasi tanah	Rp 13 juta	Pj Kades Karangsono Nur Hasyim		Pengadilan Negeri Blitar	1 tahun penjara	25 Juni 2009
99.	penyalahgunaan dana bantuan hukum	Rp 450 juta	Sekretaris Kabupaten Jember Djoewito		Mahkamah Agung	2 tahun penjara	29 Juni 2009
100.	PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Pegawai Republik Indonesia)	Rp 1,2 miliar	M. Supra, Pegawai PKPRI	Dahlan	Pengadilan Negeri Pamekasan	Bebas	7 Juni 2009
101.	mark-up pembalian tanah oleh Pemko Bukittinggi		6 terdakwa - Drs. Yasmien (Asisten I Setwilda), Asmah Ha di, SH., (Kabag Hukum), Drs. Wasdinata (Kabag Tata Pemerintahan), Drs. Anderman (Camat Mandiangin Koto Selayan), Er wansyah (Lurah Manggih Gantiang) Darma Putra (Lurah Campago Guguak Bulek)		Pengadilan Negeri Bukittinggi	Lepas	24 Juni 2009
102.	proyek Bimbingan Belajar College	Rp 800 juta	Said Bakhtiar Mazlan, Kadis Pendidikan Lingga	Antono Rustono SH	Pengadilan Negeri Lingga	1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun	Juni 2009
103.	Penyaluran raskin di Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan		Armansyahril SSos		Pengadilan Tinggi Sumatera Utara	Bebas	17 Juni 2009
104.	APBD 2004 Pemko Padangsidimpuan Tahun 2004.	Rp 8,5 Miliar	Pane Hasibuan, Bendahara Umum di Pemko Padangsidimpuan		Pengadilan Tinggi Sumatera Utara	1 tahun penjara	26 Juni 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
105.	mark-up anggaran dana pengadaan sarana sekolah SD/MI seperti rak buku, buku pelajaran, buku umum dan buku cerita anak	Rp 83 juta	Maedi Raharjo, mantan Kepala Kantor Perpustakaan (Kaperpus) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun,		Pengadilan Negeri Madiun	1 tahun dan 2 bulan penjara	16 Juni 2009
106.	pengadaan blanko KTP di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Kancapilduk) Bojonegoro	Rp 91 Juta	mantan Kancapilduk Iskandar dan mantan Kasubag Tata Usaha di Kancapilduk Khusairi.	Tumpanuli Marbun	Pengadilan Negeri Bojonegoro	Bebas	20 Juli 2009
107.	pengadaan mesin genset	Rp 18 juta	I Dewa Putu Suparta dan RP Moh. Noer	Syafruddin Ainor Rafiek,	Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan	1 tahun penjara	14 Juli 2009
108.	Pembangunan RSUD 2007	Rp 85 juta	Herman Faizal, SE pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), penasehat hukum (Krepti Sayeti, SH. Ir Kasmidi Kasim pemilik lahan dengan PH Edy Sugiarto, SH dan Suparno	Jimmy Maruli, SH, MH , M Sacral Ritonga, SH dan Otto Edwin, SH	Pengadilan Negeri Arga Makmur	Bebas	7 Juli 2009
109.	APBD Kota Solo 2003	Rp 4,272 miliar	Heru S Notonegoro dan Hasan Mulachea (mantan Ketua komisi E dan B DPRD Kota Solo 1999-2004)	Fakih Yuwono	Pengadilan Negeri Surakarta	Bebas	21 Juli 2009
110.	kredit fiktif kendaraan bermotor roda empat di BNI-OTO SKK Makassar	Rp27 miliar	Analisis kredit, Muslimin dan penyelia administrasi Ahmad Yani		Pengadilan Negeri Makassar	4 tahun penjara	10 Juli 2009
111.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kantor Samsat Kepri	Rp1,244 miliar	Mantan Kasir Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepri Priyono	Surya Perdamaian	Pengadilan Negeri Batam	5 tahun penjara	9 Juli 2009
112.	bantuan Block Grant untuk Lembaga Pendidikan Non Formal		Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Dirjen PLS) Departemen Pendidikan Nasional, Ace Suryadi, Phd	Dasniel, SH	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	13 Juli 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
113.	Dana APBD Kota Semarang 2004	Rp 2,16 miliar	mantan Ketua DPRD Kota Semarang Ismoyo Subroto, mantan Wakil Ketua DPRD HM Abdul Syukur (Hamas) Ghani dan mantan Wakil Ketua DPRD Humam Mukti Aziz.		Mahkamah Agung	1 tahun penjara	Juli 2009
114.	Dana APBD Kota Semarang 2004	Rp 2,16 miliar	Panitia Rumah Tangga atau PRT DPRD 1999-2004. Shonhadji Zaenuri, Hindarto Handoyo, Suprihadi, dan Ahmad Yusuf Sujiyanto.		Mahkamah Agung	1 tahun penjara	Juli 2009
115.	kredit usaha tani (KUT) Ponorogo	Rp 1 miliar	Imam Syafii, mantan ketua presidium Program Pemberdayaan Masyarakat Ponorogo		Mahkamah Agung	2 tahun penjara	Juli 2009
116.	Manado Beach Hotel (MBH)	Rp11,7 miliar	Elisabeth Winokan	Robert Posumah , Saur Sitindaon , IGK Wanugraha	Pengadilan Negeri Manado	Bebas	15 Juli 2009
117.	Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar	Rp 19,3 miliar	Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kutai Kartanegara (BPKD Kukar) HM Hardi	Sunaryo Wiryo SH Nugraheni Meinastiti SH dan Iman Luqmanul Hakim SH	Pengadilan Negeri Tenggarong	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	16 Juli 2009
118.	Dana APBD untuk pos DPRD Bontang	Rp6,6 miliar	anggota DPRD Bontang periode 1999-2004, Kamran Haya	Kisworo SH, Sri Harsiwi SH dan Ali Sobirin SH,	Pengadilan Negeri Bontang	Bebas	23 Juli 2009
119.	APBD Sumbawa tahun 2003	Rp 363 juta	Ir.Umar dan Ali Ibnu Husein SE (anggota DPRD Sumbawa)		Mahkamah Agung	8 tahun penjara	Juli 2009
120.	dana APBD kabupaten Jayawijaya tahun 2002	Rp.7 Milyar	21 orang mantan anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004		Pengadilan Negeri Wamena	1 tahun penjara	25 Mei 2009
121.	proyek fisik Kantor Pengairan	Rp 371 juta	Soewadi, mantan Kepala Kantor Pengairan Jember		Pengadilan Negeri Jember	1 tahun penjara	3 Februari 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
122.	proyek pembangunan 50 unit rumah sangat sederhana untuk pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil di desa Waipual kecamatan Aru Utara kabupaten Kepulauan Aru	Rp 489 juta	Wakil Direktur CV. Langgur, Ferry Fenanlambir	Amin Sfarudin	Pengadilan Negeri Ambon	4 tahun penjara	26 Juli 2009
123.	APBD Pemko Padangsidimpuan Tahun 2004		Pane Hasibuan, Bendahara Umum di Pemko Padangsidimpuan	Prof.DR. Jatinar Nababan, SH, R.Rohantoro, SH, Yasrin Nazir Nasution, SH	Pengadilan Tinggi Medan	1 tahun penjara	26 Juni 2009
124.	pungutan Sumbangan Dana Persiapan Otonomi Perguruan Tinggi (SDPOPT)	Rp 7,572 miliar	Rektor Universitas Tadulako (Untad) Sahabuddin Mustafa pada 2003 hingga 2006.	H Dirwoto dan I Made Tara	Mahkamah Agung	Bebas	April 2009
125.	Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008.	Rp 12,5 juta	Sudarto Saputro, Kepala Desa (Kades) Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	Teguh Sri Rahajo, SH, Sunggul Simanjuntak, SH.CN.M Hum dan Mira Sendangsari, SH.MH	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun	lepas dari segala tuntutan hukum (<i>onslaag</i>)	27 Agustus 2009
126.	pengadaan tanah pembangunan Celebes Convention Centre (CCC)	Rp 3 miliar	Hamid Rahim Sese, swasta	Yulman	Pengadilan Negeri Makassar	4 tahun penjara	4 Agustus 2009
127.	Askeskin		Kepala Dinas Kesehatan Pidie dr Abdul Hamid dan stafnya Dahlan SH.		Pengadilan Negeri Sigli	Bebas	11 Agustus 2009
128.	Pembayaran hutang Manado Becah Hotel		Wakil Gubernur (Wagub) Sulut nonaktif, Freddy Sualang dan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Manado nonaktif, Abdi Buchari,	I Gede Wanugraha SH	Pengadilan Negeri Manado	Bebas	31 Agustus 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
129.	Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Bahan Bakar Minyak (BBM) di RS Jiwa Daerah (RSJD) Solo	Rp 673 juta	dr Hendrina Anaatje Kuhuwael dan dr Rukma Astuti.		Pengadilan Negeri Solo	1 tahun penjara	24 Agustus 2009
130.	dana fasilitasi untuk DAU dan DAK bagi hasil dan ABT dan dana perimbangan	Rp 2,765 miliar	Bupati Purworejo non-aktif H Kelik Sumrahadi SSos MM.	Aroziduhu Waruwu SH, Benyamin Nuboba SH dan Suharyanta SH,	Pengadilan Negeri Purworejo	1 tahun penjara	24 Agustus 2009
131.	pengadaan seragam Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Temanggung		Bibit Aminatun, sekretaris dinas Pendidikan		Pengadilan Negeri Temanggung	Bebas	Agustus 2009
132.	pengadaan seragam Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Temanggung		Suwarno, pegawai dinas Pendidikan		Pengadilan Negeri Temanggung	1 tahun penjara	Agustus 2009
133.	Reklamsi Bawean	Rp 360 juta	Zaenal Arifin, mantan Kabid Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik	Djoko Sarwoko	Mahkamah Agung	1 tahun penjara	3 September 2009
134.	Belanja Tidak Tersangka (IKBTK) APBD Pidie Tahun Anggaran (TA) 2002.	Rp 7,7miliar	mantan Bupati Pidie Abdullah Yahya, Wakil Bupati Djalaluddin Harun	Said Husein, SH, Baktiar, SH dan Apriyanti, SH	Pengadilan Negeri Sigli	Bebas	31 September 2009
135.	penerimaan CPNS di Kandepag Kota Probolinggo tahun 2004	Rp 44 juta	Mantan Analis Kepegawaian Kandepag Kota Probolinggo, Drs H Lukman Sukamto	Soedarno SH, Timur P. Manurung SH, dan Imron Anwari SH	Mahkamah Agung	1 tahun dengan masa percobaan 1 tahun	September 2009
136.	Belanja Tidak Tersangka (IKBTK) APBD Pidie Tahun Anggaran (TA) 2002.	Rp 7,7miliar	Imran Usman mantan Sekretaris Daerah Pidie	Zulfikar, SH Toni Irfan, Teuku Syarafi,	Pengadilan Negeri Sigli	Bebas	31 September 2009
137.	pengadaan pupuk bersubsidi.		Alfian		Pengadilan Negeri Sungailiat	1 tahun penjara	10 September 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
138.	Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sekolah, meubeler dan pengadaan buku di 11 sekolah dasar	Rp 81 juta	Asep Jaenudin, Pejabat Teknis Pelaksana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung		Pengadilan Negeri Kota Bandung	1 tahun penjara	Agustus 2009
139.	proyek pengadaan alat-alat kesehatan di Kota Parepare.	Rp 78 juta	Julianus Hinhon, direktur PT Salus Medical	Bambang, Yusti Cinianus Radjah dan Mohammad Solihin	Pengadilan Negeri Parepare	1 tahun penjara	18 Agustus 2009
140.	pencairan kredit fiktif di Bank BPD Matra	Rp 200 juta	Rayu (caleg terpilih di DPRD Provinsi Sulbar dari PDI-P) dan I Putu Suhardana (caleg terpilih di DPRD Matra dari PDI-P).	Ricard Silalahi	Pengadilan Negeri Mamuju	Bebas	10 Agustus 2009
141.	pencairan kredit fiktif di Bank BPD Matra	Rp140 juta	Sabaruddin (anggota DPRD di Kabupaten Matra dari Partai Golkar dan Sakaruddin (kontraktor)	Ricard Silalahi	Pengadilan Negeri Mamuju	4 tahun penjara	10 Agustus 2009
142.	Pengadaan buku ajar SD/SMP 2003	Rp 8 miliar	mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Boyolali Sarwidi dan mantan Kabid TK/SD Diknas Boyolali Soeparno,.		Pengadilan Negeri Boyolali	tiga tahun empat bulan penjara	1 Oktober 2009
143.	pajak dan restribusi jasa kepelabuhanan	Rp 6 miliar	Mantan Kasi Lalu Lintas dan Perhubungan Laut Suhardi		Pengadilan Negeri Serang	18 bulan penjara	1 Oktober 2009
144.	pajak dan restribusi jasa kepelabuhanan	Rp 6 miliar	Bendaharawan Hendrik Ramlen Tambunan		Pengadilan Negeri Serang	2 tahun penjara	1 Oktober 2009
145.	pajak dan restribusi jasa kepelabuhanan	Rp 6 miliar	Mantan Kasubdin Perhubungan Laut (Hubla) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Marsongko Miftah Fatihin		Pengadilan Negeri Serang	2 tahun 4 bulan penjara	6 Oktober 2009
146.	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sungai Bahar, Kabupeten Muarojambi	Rp 4 miliar	Sudiro Lesmana , rekanan proyek		Mahkamah Agung	5 tahun penjara	Oktober 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
147.	pengadaan bibit kakao di Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kota Sawahlunto	Rp290 juta	Nasrul Bakar, mantan pejabat Dinas Pertanian Kota Sawahlunto dan Jasman M, pimpinan kegiatan dalam proyek		Pengadilan Negeri Sawahlunto	1 tahun penjara	14 Oktober 2009
148.	Menyalahgunakan dana Block Grant untuk peningkatan mutu sekolah dan dana bantuan penyelenggaraan Sekolah Standard Nasional (SSN) tahun ajaran 2007	Rp300 juta	mantan Kepala SMPN 5 Kota Sukabumi, HR Binyamin MPd,		Pengadilan Negeri Sukabumi	1 tahun penjara	19 Oktober 2009
149.	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2007	Rp 4,1 miliar	Azizah M Seif, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat bersama tiga stafnya Legimun, Adilita dan Ismail.	Hasmayetti	Pengadilan Negeri Stabat Langkat	4 tahun penjara	29 Oktober 2009
150.	dana hibah program pemberdayaan masyarakat miskin,	Rp 59 juta	Roib Fitrianto, dan Fitratul Laily, pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK).		Pengadilan Negeri Jember	1 tahun penjara	10 Oktober 2009
151.	pengadaan bahan teori dan peralatan praktik pelatihan	Rp 162 juta	Ratih Widyawati, Bendahara Balai Latihan Kerja (BLK),		Pengadilan Negeri Mungkid Magelang	1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun	Oktober 2009
152.	pembangunan Jalan Bengkong Palapa dan Bengkong PBN	Rp1,67 miliar	Direktur PT Sinar terang Surya Abadi (STSA) Pantur Sitompul, Direktur PT Sariyuda Johor Pratama (SJP) Rita Novianti dan Direktur CV Putri Cahaya Timur Togap Sinambela		Pengadilan Negeri Batam	6 tahun penjara	13 Oktober 2009
153.	pembangunan Jalan Bengkong Palapa dan Bengkong PBN	Rp1,67 miliar	Anggota DPRD Propinsi Kepri Johnson Napitupulu .	Julien Mamahit dengan anggota Rudi Rafli Siregar dan Sorta	Pengadilan Negeri Batam	Bebas	13 Oktober 2009
154.	gratifikasi dari pemkot Surabaya ke DPRD Surabaya	Rp 720 juta	Sekkota Sukamto Hadi, Asisten II Muhlas Udin, dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Purwito.		Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas	Oktober 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
155.	Penyimpangan penyelewengan One day Care (ODC) di lingkungan RSSA Malang		Staf Medik Fungsional (SMF) Mata Rumah Sakit dr. Syaiful Anwar Malang, Syafaruddin Refa		Pengadilan Negeri Kota Malang	Bebas	19 Oktober 2009
156.	Proyek Sidoarjo Membangun 2002	Rp 2,1 miliar	Soekarno, Direktur Utama PT Sidoarjo Membangun 2002-2004		Mahkamah Agung	Bebas	Oktober 2009
157.	proyek rehabilitas rumah tak layak huni dalam program komunitas adat terpencil (KAT) pada tahun 2005 di Desa Gellaman Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, Sumenep		Abdul Azis Salim Syabibi	Irwan Wardhana	Pengadilan Negeri Sumenep	Bebas	20 Oktober 2009
158.	dana purnabakti DPRD Sikka periode 1999-2004		Mantan Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus		Pengadilan Negeri Maumere	Bebas	9 November 2009
159.	dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Kabupaten Sumenep,	Rp 24 juta	Mulyadi, pelaksana proyek		Pengadilan Negeri Sumenep	4 tahun penjara	11 November 2009
160.	dana alokasi khusus diknas Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2006		Wakil Bupati non aktif, Jance Wowiling Sajow.		pengadilan negeri Tondano	Bebas	21 November 2009
161.	penggelapan besi tua milik Dinas PU Propinsi NTT		Sutrisno Gorang alis Lolong, staff Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Alor		Pengadilan Negeri Kalabahi NTT	1 tahun penjara	9 November 2009
162.	penggelapan besi tua milik Dinas PU Propinsi NTT		Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Alor non aktif, Ir. Sumardin Sutiyo.		Pengadilan Negeri Kalabahi NTT	1 tahun penjara	9 November 2009
163.	gratifikasi dari pemkot Surabaya ke DPRD Surabaya	Rp 720 juta	MUSYAFAK ROUF mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2004-2009 dan anggota dewan untuk periode 2009-2014.		Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas	November 2009
164.	pengadaan tanah PA Cianjur, Jawa Barat		Cjetjep Sadudin, sekretaris panitera PA Cianjur		Pengadilan Negeri Cianjur	1 tahun penjara	14 November 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
165.	pengadaan lahan lokasi PLTU Unit 2 Jawa Tengah di Desa Bunton, Kecamatan Adipala.	Rp 692 juta	Sekretaris Desa Bunton Sudaryanto		Pengadilan Negeri Cilacap	4 tahun penjara	25 November 2009
166.	pengadaan lahan lokasi PLTU Unit 2 Jawa Tengah di Desa Bunton, Kecamatan Adipala.	Rp146 juta	Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Cilacap Pudjo Prasetyo		Pengadilan Negeri Cilacap	1 tahun penjara	26 November 2009
167.	APBD Bojonegoro Tahun 2007 di dua pos anggaran	Rp 6 miliar	mantan Kabag Keuangan Pemkab Bojonegoro, Zainuri	Sri Murwahyuni	Pengadilan Tinggi Jatim.	Bebas	November 2009
168.	proyek pembangunan batu pemecah ombak (breakwater) yang dananya bersumber dari APBK 2004 dan 2005.	Rp1,2 miliar	kontraktor pelaksana Hasyim Baharuddin serta dua konsultan pengawas Kharlis dan Aryadin		Pengadilan Negeri Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan	1 tahun penjara	14 November 2009
169.	proyek pembangunan batu pemecah ombak (breakwater) yang dananya bersumber dari APBK 2004 dan 2005.	Rp1,2 miliar	mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Herman Arsyad dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mukhyar Idris		Pengadilan Negeri Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan	1 tahun 6 bulan penjara	14 November 2009
170.	peyalahgunaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2007	Rp 1,7 miliar	Rahno Irianto, Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Kediri.		Pengadilan Negeri Kota Kediri	1 tahun penjara	23 November 2009
171.	penyelenggaraan Festival Budaya Islam (FBI)	Rp.7,5 Miliar	anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Sirajuddin Gayo selaku kuasa dari CV.Grend Production, Drs.Toras Sulaiman selaku Kabag TU Disbudpar dan Yohannes selaku Direktur CV.Grend Production dan Kepala Dinas Pariwisata Medan, Syarifuddin SH.	Yuferry F Rangka	Pengadilan Negeri Medan	1 tahun penjara	25 November 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
172.	proyek fiktif antara Institut Teknologi Bandung dan Bank Jabar		analisis Bank Jabar M Taufik dan Fajar Hartadi, serta Konsultan Penilai Anggunan Wawan Hermawan.	I Made Sukadana	Pengadilan Negeri Bandung	1 tahun penjara	12 November 2009
173.	proyek fiktif antara Institut Teknologi Bandung dan Bank Jabar		Setiadi , pegawai honorer kampus ITB	I Made Sukadana	Pengadilan Negeri Bandung	18 bulan penjara	12 November 2009
174.	pengadaan barang di empat SMK negeri di Sragen pada tahun 2006	Rp 383 juta	Drs Jumadi MM, Kabid SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Sragen	Poltak Sitorus	Pengadilan Negeri Sragen	1 tahun penjara	23 November 2009
175.	proyek di Dinas Perhubungan Kota Medan	Rp450 juta	Syafaruddin, mantan Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan		Pengadilan Negeri Medan	1 tahun penjara	23 November 2009
176.	Kebocoran uang PDAM sejak Mei 2005 hingga Februari 2008	Rp 2,2 miliar	Kepala Bagian Keuangan PDAM, Agus Sugiantono		Pengadilan Negeri Lumajang	1 tahun penjara	2 November 2009
177.	Pengadaan MCK (Mandi Cuci, Kakus) di Gresik	Rp 125 Juta	Purnomo Edy Mulyono mantan anggota DPRD Gresik dari Partai Golkar Gresik.	Taswir, Erwin Tjong dan Sri Sulastrri	Pengadilan Negeri Gresik	1 tahun penjara	November 2009
178.	Proyek pembangunan jalan lingkaran Ketapang		Darodji, anggota DPRD dari Partai Demokrat		Pengadilan Negeri Banyuwangi	Bebas	2 Desember 2009
179.	pengelembungan dana (<i>mark up</i>) pengadaan lahan untuk kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cianjur	Rp 1,9 miliar	Dodi Agus Fadilah, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandung	Goenawan Wanaradja, SH, , Suparman, SH, MH dan Tongani, SH	Pengadilan Negeri Cianjur	Bebas	2 Desember 2009
180.	peningkatan jalan AMD Bangka Selatan		Vira Dwisetya dan Yani.(swasta)		Pengadilan Negeri Sungailiat	1 tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun	Desember 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
181.	menyelewengkan dana bantuan partai		Sanusi Gofur (Wakil Ketua DPRD Indramayu).		Pengadilan Negeri Indramayu	Bebas	8 Desember 2009
182.	proyek pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007		Ir Iqbal Satria utama, Direktur Utama (Dirut) PT Surya Pembina Pratama, yang juga anggota DPRD Jatim dari Partai Demokrat	Lindi Kusumaningtyas SH	Pengadilan Negeri Sampang	Bebas	22 Desember 2009
183.	Dana Dinas Perikanan dan Kelautan Inhil		Ruskin Har, Rusli alias Ayong dan Ir H Wirman MM Bin ST Dahmir		Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Bebas	Agustus 2009
184.	Perum Bulog Riau	Rp10 miliar	Hendri Meirizal mantan Kabid Perdagangan pada bidang Komersil Perum Divisi Bulog Riau dan Zulbuhari Manajer Keuangan PT RCI		Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Lepas	2009
185.	pemalsuan pita cukai rokok		Achmad Fadilah, dan David Setiadi.	Nyoman Gede Wirya, Bambang Kusmunandar dan Titus Tandi	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas	7 Desember 2009
186.	Pembangunan PLTG Tanjabar	Rp 7 miliar	Direktur PT TJP Bambang Sutedjo dan Direktur BUMD Jabung Sakti Iriyani,	Dulami, SH, Supriyanto SH, Sahat,SH, Icwayudin,SH, R Hendi,SH	Pengadilan Negeri Kualatungkal Jambi	Bebas	10 September 2009
187.	proyek Jalan Talisayan-Batas Berau	Rp 1,8 miliar	Awang Dharma Bakti, mantan Kadis PU dan Kimpraswil Kaltim		Pengadilan Negeri Samarinda.	Bebas	17 November 2009
188.	Penjualan beras untuk rakyat miskin	Rp 5 juta	Bumasrap, kades sengon		Pengadilan Negeri Bojonegoro	1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun	3 November 2009
189.	pelepasan tanah kas desa (TKD) untuk tanah makam warga perumahan Pertamina	Rp123 juta	Kepala Desa (Kades) Purwomartani, Kalasan, Asmawi	Tutut Topo Sri Purwanti (ketua), Kadarisman Iskandar dan Aris Bawono	Pengadilan Negeri Sleman	Bebas	11 November 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
190.	pengadaan inventaris rumah dinas Ketua DPRD Tebingtinggi,	Rp 30 juta	bendahara rutin Sekretariat DPRD Rasmayani, Sekwan Drs H Nizar Rangkuti dan Ketua DPRD HM Syafril Chap		Pengadilan Tinggi Medan	1 tahun dengan masa percobaan 1 tahun	Desember 2009
191.	menerima gaji dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dalam rentang Januari 2004 hingga akhir 2008, meski dirinya sudah tidak lagi menjabat dosen	Rp80 juta	Herry J Kereh calon wali kota Manado periode 2010-2015.	I Made Sukanda, SH	PENGADILAN Negeri Manado, Sulawesi Utara	Bebas	15 Desember 2009
192.	/penyimpangan dalam pemberian Kredit Koperasi Primair untuk Anggotanya (KKPA) oleh PT. Bank Pembangunan Kalteng Tahun 1996 kepada KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah	Rp 8 miliar	Bambang Sutikto Direktur Operasional PT. Surya Barokah		Pengadilan Negeri Palangka Raya	2 tahun penjara	10 Desember 2009
193.	Pinjaman masal	Rp 3,4 miliar	18 personel Dekab Talaud plus mantan Sekwan dan Bendahara		Pengadilan Negeri Tahuna Sulut	Lepas	Desember 2009
194.	Penyimpangan dinas pertambangan Donggala	Rp 300 juta	mantan Kepala Dinas Pertambangan Donggala, Drs Hasan Latjinta MM.		Pengadilan Negeri Palu	Bebas	3 September 2009
195.	APBD Jateng 2003	Rp 350 juta	mantan ketua dan wakil ketua Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD Jateng Drs HM Asrofie, H Soejatno Sastro Widjojo SH, dan HM Wahono Ilyas SE		Mahkamah Agung	Lepas	Desember 2009
196.	proyek Pembinaan, Penyiapan, Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar tahun anggaran 2006	Rp 300 juta	Achyarman, Direktur Utama PT Pembangunan Sumbar	Masrul, S.H., M.H., Wendra Rais, S.H., dan Admiral, S.H., M.H	Pengadilan Negeri Padang	Bebas	8 September 2009

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
197.	Dinas Pendidikan Kutim, tahun anggaran 2006	Rp 231 juta	Elok Sri Wahyuningsih, Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Kutim		Pengadilan Negeri Sangatta	Bebas	9 Juli 2009
198.	kredit macet di BNI 46 Muna	Rp 1,4 miliar	lima mantan pejabat BNI Baubau dan nasabah Wa Ode Ifa	Jamaluddin Samosir	Pengadilan Negeri Muna	Bebas	22 Januari 2009
199.	pelepasan tanah kas desa Caturtunggal	Rp 688 juta	Pelaksana harian Lurah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Herri Sugianto dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal Djumenggir		Pengadilan Negeri Sleman	4 tahun penjara	29 Desember 2009

Pengadilan Tipikor mengkhawatirkan

Meskipun hingga saat ini (dari 105 terdakwa) tidak ada vonis bebas atau percobaan yang dihasilkan oleh pengadilan tipikor, namun demikian mulai muncul kekhawatiran terjadi pelemahan terhadap institusi ini khususnya dalam penjatuhan vonis. Tahun 2009 ditandai dengan munculnya vonis ringan bagi pelaku korupsi dan pengurangan hukuman ditingkat kasasi/peninjauan kembali. Vonis ringan dijatuhkan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor kepada Syahril Oesman mantan Gubernur Sumatera Selatan, terdakwa proyek pembangunan pelabuhan Tanjung Api Api yang hanya divonis 1 (satu) tahun penjara. Sebelumnya selama empat tahun terakhir, Pengadilan Tipikor tidak pernah menjatuhkan vonis ringan ini. Selain itu tercatat terdapat lima kasus korupsi yang vonisnya ditingkat kasasi Tipikor lebih rendah dari pengadilan tingkat pertama (PN Tipikor).

No	Perkara Korupsi	Terdakwa	Putusan Tingkat Pertama	Putusan Kasasi	Waktu
1.	Pengeluaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman kepada 15 perusahaan	Mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar	16 tahun penjara	11 tahun penjara	Agustus 2009
2.	aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar	mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah	5 tahun penjara	3 tahun penjara	Agustus 2009
3.	aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar	mantan Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia Oey Hoey Tiong dan Mantan Kepala Biro Bank Indonesia Surabaya Rusli Simanjuntak.	4 tahun penjara	Oey Hoey Tiong (3 tahun penjara) dan Rusli Simanjuntak (3 tahun enam bulan penjara)	Agustus 2009
4.	Suap alih fungsi hutan	Al Amin Nur Nasution, anggota DPR RI	8 tahun penjara	6 tahun penjara	September 2009
5.	Pengadaan Damkar di pemkot Medan	mantan Walikota Medan, Abdillah	5 tahun penjara	4 tahun penjara	September 2009
6.	dana nonbudgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan.	mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri	7 tahun penjara	4,5 tahun penjara (peninjauan kembali)	November 2009